



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 100/3.3.2/983/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 100.3.3.2/
674/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAN
PRIORITAS DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Merauke Perihal Permohonan Revisi Lampiran Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/674/Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025, karena adanya penambahan Kegiatan Prioritas Daerah pada Lampiran Keputusan Bupati, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/674/Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2025 (DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Merauke)
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/674/Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
YOSEPH B. GEBZE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003

Salinan...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 100.3.3.2/983/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
MERAUKE NOMOR 100.3.3.2/674/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2025

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4
1.	PEMBANGUNAN BARU LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	16.612.608.000,-	DINAS KESEHATAN
2.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS PROTOTYPE NGGUTI	13.117.948.000,-	DINAS KESEHATAN
3.	PEMBANGUNAN JALAN KIMAAM-TURIRAM	12.598.073.912,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DAMBUKU/TAHAP 2	12.115.982.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	PEMBANGUNAN JALAN KAMPUNG WAAN KE PELABUHAN	7.000.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	PJ MURAM SARI SEMANGGA 3	3.850.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	PJ KURIK 4,5,6	3.850.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	PENINGKATAN JALAN SIMPANG SIGABEL-KAMPUNG MAN WAI BOB	3.462.644.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	PENINGKATAN JALAN WASUR-VETERAN	3.103.456.332,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	PJ PENDIDIKAN	2.500.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
YOSEPH B. GEBZE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003